

**ANALISIS PENGELOLAAN BELANJA
PEMERINTAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 – 2011**

**JURNAL ILMIAH
MAGISTER EKONOMI (ME)**

Pada Program Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Tanjungpura

Oleh :
JOKO WAHONO
NIM. B61110035



**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2012**

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the management of government spending in the budget revenue and expenditure covering indirect expenditures and direct spending. The use of data in the analysis is Realized Budget Report (LRA) District stronghold Kingdom in 2008 to 2011. With good management of expenditure, local governments are expected to realize the fruits of development and creating services directed to the needs of the community area.

This study uses a qualitative approach to the analysis of analytical tools used is the analysis of the ratio of expenditure, spending growth analysis, optimization analysis of expenditure, expenditure efficiency analysis and analysis of government budget allocations in support of the mission set forth in RPJMD Kubu Raya district.

Results showed that the management of government spending Kubu Raya district average ratio of indirect expenditures greater than direct expenditures, indirect expenditures prefers budget contribution for the benefit expenditure. For the average capital expenditures in 2008-2011 amounted to 32.99% of the total expenditure, the annual spending growth occurs by prioritizing the provision and improvement of infrastructure in the public interest.

In 2009 and in 2010 the management of government spending in Kubu Raya district is not good and is not optimal, in 2008 and 2011 as well as perform well and the optimal efficiency of spending. The allocation of budgets based on the achievement of performance targets RPJMD good to excellent strategic.

Keywords: Shopping area, Managed Expenditure

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, maka sejak saat itu pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, utuh dan bulat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai sebuah pertanggungjawaban publik. Untuk melaksanakan pertanggungjawaban publik tersebut, Pemerintah daerah harus melakukan kebijakan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien dari setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan Negara. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif tahunan daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam proses penyusunan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dilakukan dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* digunakan dalam hal penentuan kebijakan, sedangkan pendekatan *bottom-up* dilakukan dalam penentuan kegiatan dan angka anggaran. Perubahan dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dijelaskan sebagai berikut, didalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 belanja pemerintah dibagi menjadi Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasional Pemerintah (BOP) dan Belanja Modal (BM). Sedangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja pemerintah hanya dibagi menjadi dua jenis belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah Otonom yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berdiri dari hasil pemekaran Kabupaten Pontianak, peluang sebagai daerah yang mandiri mengharuskan Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan APBD dengan tepat, efektif dan efisien untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik serta kemandirian daerah, sesuai dengan Arah Kebijakan Umum dan prioritas anggaran sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD dengan asas kepatutan, kepatuhan, dan kemampuan daerah.

1.2 Permasalahan dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana Kinerja Pengelolaan Belanja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selama periode 2008-2011 ?

Tujuan Analisis yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.2 Untuk menganalisis Rasio Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Belanja Pemerintah, Optimalisasi Belanja Pemerintah, dan Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- 1.2.3 Untuk menganalisis Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah dalam mendukung Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif.

1.3.2 Prosedur Penelitian

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam membahas dan menganalisis permasalahan maka ditetapkan batasan analisis pada penelitian ini pada Laporan Realisasi Anggaran, dalam pertanggungjawaban Bupati Kubu Raya tahun 2008 sampai dengan 2011, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2009 – 2014 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kubu Raya tahun 2011.

1.3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung tulisan ini adalah data sekunder data yang bersifat kuantitatif diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan data lainya yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu

APBD dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 – 2011, RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2009 – 2014 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kubu Raya tahun 2011.

1.3.4 Metode Analisis Data

Alat analisis atau komponen analisis yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal menggunakan Analisis Rasio Belanja.

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

2. Untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ketahun positif atau negatif, menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja.

$$\text{Analisis Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times 100 \%$$

3. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan Analisis Keserasian Belanja, dalam total belanja jika belanja langsung lebih besar dari pada belanja langsung dianggap tidak baik, demikian sebaliknya. Jika Belanja Pegawai > 50 % dalam Total Belanja, maka dikatakan anggaran belanja tidak baik, demikian pula sebaliknya.

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

4. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola belanjanya apakah melakukan efisiensi anggaran atau tidak, menggunakan Analisis Efisiensi Belanja.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

5. Analisis Alokasi Anggaran Belanja Dalam Mendukung Misi RPJMD adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja apakah sudah sesuai dengan RPJMD yang telah disusun, dan berapa besar persentase anggaran belanja yang dialokasikan dari total belanja daerah yang ditetapkan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Hasil

2.1.1 Analisa Rasio Belanja

Berdasarkan hasil analisis rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung, bahwa dari tahun 2008-2011 dana yang dimiliki pemerintah lebih besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung, sehingga rasio rata-rata belanja tidak langsung (52,89 %) lebih besar dibandingkan rasio rata-rata belanja langsung (47,11 %). Perhitungan rasio belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung tahun 2008-2011 rata-rata belanja pegawai memberikan kontribusi yang sangat besar (82,45 %). Analisis belanja modal terhadap total belanja rata-rata rasio belanja pada tahun 2008-2011 sebesar 32,99 %.

2.1.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja, tahun 2009 lebih mengutamakan belanja tidak langsung, sehingga persentase pertumbuhan belanja tidak langsung sangat besar (5460,97 %), sedangkan pada tahun 2010 dan tahun 2011 lebih diutamakan untuk belanja langsung, sehingga persentase pertumbuhan belanja langsung lebih besar dari persentase pertumbuhan belanja tidak langsung.

2.1.3 Analisis Optimalisasi Belanja

Pada tahun 2008 dan tahun 2011 berdasarkan analisis optimalisasi (keserasian) belanja menunjukkan persentase belanja langsung lebih tinggi dari persentase belanja tidak langsung, berarti pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan belanja dianggap baik. Pada tahun 2009 dan tahun 2011 persentase belanja tidak langsung lebih tinggi dari persentase belanja langsung, berarti pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan belanja dianggap tidak baik. Perhitungan rasio keserasian belanja, rata-rata belanja tidak langsung sebesar 52,89 % dan rata-rata belanja langsung sebesar 47,11 %.

Belanja pegawai tahun 2008, 2010 dan 2011 dianggap anggaran belanja baik, sedangkan tahun 2009 anggaran belanja dianggap tidak baik.

2.1.4 Analisis Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, pengelolaan belanja pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan efisiensi, dimana rata-rata rasio efisiensi periode 2008-2011 memberikan kontribusi sebesar 93,02 %.

2.1.5 Analisis Alokasi Anggaran Belanja Dalam mendukung Misi RPJMD

Hasil analisis dan evaluasi diketahui bahwa pengalokasian anggaran belanja pemerintah sudah sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya dan capaian kinerja Sasaran Strategis pada umumnya baik sampai baik sekali.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Analisa Rasio Belanja

2.2.1.1 Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja.

Pada dasarnya belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Perhitungan rasio belanja tidak langsung dari tahun 2008-2011 mengalami kenaikan dan penurunan secara bervariasi. Pada tahun 2008 rasio belanja tidak langsung sebesar 22,90 %, pada tahun 2009 rasio belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 74,65 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hanya mengelola keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Hibah dari Kabupaten Pontianak selaku Kabupaten Induk serta Dana Bagi Hasil Provinsi. Sedangkan kenaikan rasio belanja tidak langsung pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyusun sendiri APBD yang diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan dasar, pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 %, penambahan jumlah pegawai, pemenuhan dan peningkatan ketersediaan infrastruktur, penyusunan jaringan data spasial dan data base serta peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 rasio belanja tidak langsung, mengalami penurunan secara beruntun menjadi sebesar 67,99 % dan 46,02 %, hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya lebih mengutamakan kepentingan belanja langsung.

Pada tahun 2008-2011 dana yang dimiliki pemerintah lebih besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar 52,89 % sedangkan rasio rata-rata belanja langsung sebesar 47,11 %. Ini menunjukkan bahwa dari total belanja, lebih besar dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pada tahun 2008 belanja langsung distribusi anggaran cukup tinggi sebesar 77,10 %, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengutamakan program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, antara lain untuk pemenuhan dan peningkatan ketersediaan infrastruktur. Pada tahun 2009 belanja langsung mengalami penurunan menjadi 25,35 % yang berarti rasio belanja langsung mendapat distribusi anggaran hanya 25,35 % dibandingkan total belanja. Ini berarti pemerintah daerah masih mengutamakan belanja tidak langsung. Sedang pada tahun 2010 dan tahun 2011 persentase belanja langsung mengalami kenaikan berturut-turut menjadi sebesar 32,01 % dan 53,98 %. Hal ini berarti pemerintah daerah berusaha untuk mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kepentingan publik dengan tujuan agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas, antara lain penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan dasar dan untuk anggaran pendidikan.

2.2.1.2 Analisis Rasio Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Tidak Langsung.

Perhitungan rasio belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung, perhitungan rasio belanja dari tahun 2008-2011 mengalami penurunan dan kenaikan secara bervariasi. Pada tahun 2008 rasio belanja sebesar 84,61 %, pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 72,73 % dan meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi sebesar 83,28 % dan tahun 2011 sebesar 89,16 %. Hal ini berarti pemerintah daerah masih mengutamakan belanja pegawai untuk belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rasio belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung, rasio rata-rata belanja pegawai memberikan kontribusi yang sangat besar yaitu 82,45 % terhadap belanja tidak langsung dan sisa dari belanja pegawai dialokasikan pada belanja hibah sebesar 6,04 %, belanja bantuan sosial sebesar 4,27 %, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 6,30 %. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lebih mengutamakan kontribusi anggaran belanja tidak langsung untuk kepentingan belanja pegawai, sedangkan belanja tidak langsung lainnya, dana yang dianggarkan kontribusinya masih relatif kecil yang berarti rasio belanjanya juga masih relatif kecil terhadap belanja tidak langsung.

2.2.1.3 Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja.

Rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2008-2011 mengalami naik dan turun secara berfluktuasi, dimana pada tahun 2008 rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 46,40 %, pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 25,23 %, pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 32,01 % dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 28,34 %. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3, bahwa pada tahun 2008-2011 dana yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun 2008 sebesar Rp. 12.998.345.250,00 berarti distribusi rasio belanja modal sebesar 46,40 % terhadap anggaran total belanja. Pada tahun 2009 dana yang dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp. 120.616.875.875,00 dengan distribusi rasio belanja modal sebesar 25,23 %. Sedangkan pada tahun 2010 rasio belanja sebesar 32,01 % ini berarti distribusi belanja modal hanya 32,01 % dari total belanja, pada tahun 2011 rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 28,34 %, berarti distribusi belanja modal sebesar 28,34 % dari total belanja.

Rasio belanja modal terhadap total belanja rata-rata pada tahun 2008-2011 sebesar 32,99 %, sehingga hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD masih relatif kecil yang dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini berarti belanja modal untuk penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnya melebihi satu tahun yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat masih relatif kecil (32,99 %).

2.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

2.2.2.1 Analisis Pertumbuhan Total Belanja dan Pertumbuhan Realisasi Belanja.

Pertumbuhan belanja, dari total belanja setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, sedangkan realisasi belanja juga mengikuti kenaikan total belanja. Persentase pertumbuhan total belanja pada tahun 2009 sangat besar (1606,76 %), hal ini menunjukkan kriteria positif (baik), dimana pertumbuhan belanja tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana pemerintah, pengadaan ketersediaan infrastruktur, penambahan pegawai baik PNS maupun pegawai honorer dan yang paling memerlukan dana besar adalah kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2009.

Menurunnya persentase pertumbuhan total belanja tahun 2010 dan tahun 2011 menunjukkan ukuran kinerja negatif, disebabkan oleh kenaikan anggaran belanja tidak sampai 50 % tiap tahunnya. Kenaikan anggaran belanja yang tidak terlalu tinggi tersebut di akibatkan oleh ketatnya peraturan perencanaan penganggaran belanja pemerintah, dengan keluarnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan selanjutnya yang paling dianggap mungkin adalah pembagian DAU dari pemerintah Pusat dalam menentukan plafon anggaran kepada Pemda Kubu Raya, yang besarnya cenderung tetap atau meningkat sedikit dalam belanja langsung. Menurunnya persentase total belanja, walaupun jumlah total belanja tetap naik, disebabkan tidak konsistennya pembagian DAU dari pemerintah pusat. Melihat persentase pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2010 dan tahun 2011 menunjukkan kinerja yang sama, yaitu negatif, dimana persentasenya terus menurun 38,61 % pada tahun 2010 dan 24,34 % pada tahun 2011, hal ini disebabkan oleh rendahnya penyerapan pengelolaan anggaran belanja langsung.

2.2.2.2. Analisis Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Pertumbuhan belanja tidak langsung pada tahun 2009 persentase pertumbuhan sangat besar (5460,97 %), hal ini dikarenakan Kabupaten Kubu Raya yang baru dua tahun menjalankan pemerintahannya, sehingga masih memerlukan dana yang besar untuk membiayai pembangunan sarana prasarana pemerintah, penambahan pegawai negeri sipil (PNS). Demikian juga dengan belanja langsung, persentase pertumbuhan sebesar 458,43 % yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur yang langsung dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan pelayanan publik.

Pada tahun 2010 terjadi penurunan persentase pertumbuhan, baik belanja tidak langsung (28,69 %) maupun belanja langsung (97,19 %). Turunnya persentase pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung disebabkan berkurangnya pengalokasian anggaran tersebut pada tahun 2010. Kendatipun demikian pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap mengutamakan anggarannya untuk kebutuhan publik. Bahkan pada tahun 2011 persentase pertumbuhan belanja tidak langsung, mengalami pertumbuhan yang negatif (- 19,20 %), hal ini

karena anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2011 dananya dikurangi, sedangkan persentase pertumbuhan belanja langsung meningkat menjadi 101,34 %, hal ini berarti pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap memberikan prioritas untuk pengadaan dan perbaikan infrastruktur serta untuk kepentingan masyarakat banyak (publik), seperti untuk pelayanan kesehatan dan pemenuhan anggaran pendidikan.

2.2.3 Analisis Optimalisasi Belanja

Implementasi dari pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menyerap anggaran secara optimal, yang dimaksud optimal disini adalah penggunaan dalam pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengelola anggaran mendekati 100 %. Dengan menggunakan analisis keserasian belanja, dapat dilihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan anggarannya. Alokasi anggaran yang dimaksud adalah belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Prioritas pembangunan daerah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mengalokasikan pengeluaran atau belanjanya untuk pembangunan yang berkenaan dengan pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bagaimanapun dijadikan tolok ukur terpenting dari keberhasilan pemerintah. Pada tahun 2008 pemerintah Kabupaten Kubu Raya lebih banyak mengalokasikan belanjanya untuk belanja langsung, sehingga dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kubu Raya yang baru berdiri lebih mementingkan untuk pembangunan yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga belanja langsung menjadi prioritas dalam belanja pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2009 dan tahun 2010 lebih banyak mengalokasikan belanjanya untuk alokasi belanja tidak langsung, sehingga dianggap tidak baik. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kubu Raya lebih banyak mementingkan peningkatan sumber daya manusia, sehingga belanja pegawai menjadi prioritas dalam belanja pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2011 belanja langsung menjadi prioritas lebih tinggi dalam belanja pemerintah. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dianggap baik dalam mengoptimalkan belanja atau pengeluaran pemerintahnya, dengan mengalokasikan anggarannya yang diarahkan dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

2.2.3.1 Analisis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (Rasio Keserasian Belanja)

Pada tahun 2008 belanja langsung persentasenya lebih tinggi (77,10 %) dari pada belanja tidak langsung (22,90 %). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memprioritaskan anggaran belanjanya untuk pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik, sehingga menghasilkan tingginya belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, berarti pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan anggaran belanja dianggap baik. Kemudian pada tahun 2009 dan tahun 2010 belanja tidak langsung persentasenya lebih tinggi dari belanja langsung, berarti pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan anggaran belanja dianggap tidak baik. Sedangkan

tahun 2011 belanja langsung persentasenya lebih tinggi dari belanja tidak langsung, berarti pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan anggaran belanja dianggap baik.

Perhitungan rasio keserasian alokasi dana pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata belanja tidak langsung sebesar 52,89 %, ini berarti dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 52,89 % dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan rata-rata belanja langsung sebesar 47,11 %, berarti dana yang dialokasikan untuk biaya pelayanan publik sebesar 47,11 %. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum mampu mengoptimalkan dananya untuk biaya pelayanan publik serta menyediakan sarana dan prasarana ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Selama tahun 2008-2011 dapat dilihat bahwa alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung besarnya bervariasi setiap tahunnya.

2.2.3.2 Analisis Belanja Pegawai terhadap Total Belanja.

Peningkatan belanja pegawai walaupun menjadi beban dalam DAU setiap Pemerintah Daerah, dalam otonomi daerah menjadi keharusan. Untuk mengetahui besar atau kecilnya alokasi belanja pegawai yang dianggarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Belanja pegawai tahun 2008 sampai tahun 2011 tidak pernah lebih dari 50 %, tetapi pada tahun 2009 besarnya belanja pegawai lebih besar dari belanja langsung, yaitu sebesar 54,27 %. Sesuai dengan kriteria, bahwa anggaran belanja pegawai tahun 2008, tahun 2010 dan tahun 2011 dianggap anggaran belanja baik, artinya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan anggaran belanja pegawainya tidak melebihi total belanja yang diperuntukan untuk belanja publik, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahun 2009 belanja pegawai (54,27 %) lebih dari 50 %, ini dapat diartikan anggaran belanja kurang baik, artinya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan anggaran belanja pegawai melebihi total belanja yang diperuntukan membiayai keperluan pegawai. Dimana belanja pegawai selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat, kebijakan gaji ke 13 (tiga belas) dan pemberian insentif tiap bulan berdasarkan absensi, dengan besarnya berbeda tiap daerah otonomi tergantung dari kemampuan daerah.

2.2.4 Analisis Efisiensi Belanja

Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini bersifat relatif, artinya ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Untuk itu dapat diartikan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 %, sebaliknya jika melebihi 100 % maka mengindikasikan terjadi pemborosan anggaran.

Hasil perhitungan rasio efisiensi tiap tahunnya realisasi belanja lebih rendah dari pada total belanja yang ditetapkan. Pada tahun 2009 rasio efisiensi (92,12 %) lebih rendah dari tahun 2008 (95,38 %), berarti pada tahun 2009 belanja pemerintah daerah relatif efisien dibanding tahun 2008. Demikian juga pada tahun 2010 (90,40 %), belanja pemerintah relatif efisien dibandingkan

tahun 2009 (92,12 %). Sedangkan pada tahun 2011 rasio efisiensi sebesar 94,02 % lebih besar bila dibandingkan tahun 2010 (90,40 %) dan tahun 2009 (92,12 %) hal ini berarti belanja pemerintah daerah tidak efisien bila dibandingkan tahun 2010 dan tahun 2009, namun masih relatif efisien bila dibandingkan belanja pemerintah daerah tahun 2008.

Dalam pengalokasian belanja dan pengelolaan belanja pemerintah, terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan efisien dalam melaksanakan pengelolaan belanjanya. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan pemborosan (efisien) dari tahun 2008-2011, dimana rata-rata rasio efisiensi periode 2008-2011 memberikan kontribusi sebesar 93,02 %. Realisasi belanja lebih kecil dibandingkan anggaran belanja setiap tahunnya, ini dikarenakan adanya kegiatan atau program yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut, sehingga penyerapan alokasi anggaran belanja tidak mencapai 100 %.

2.2.5 Analisis Alokasi Anggaran Belanja Dalam Mendukung Misi RPJMD

Analisis alokasi anggaran belanja pemerintah dalam mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan belanja apakah sudah sesuai dengan RPJMD yang telah disusun. Analisis dan evaluasi Pengukuran kinerja Sasaran Strategis yang terdapat dalam Misi RPJMD Tahun 2011 dapat dilakukan sebagai berikut :

2.2.5.1 Analisis dan Evaluasi Alokasi Anggaran Belanja Misi 1(satu)

Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 48 (empat puluh delapan) Indikator Kinerja Utama. Belanja untuk Sasaran Strategis 1 (satu), 2(dua) dan 3 (tiga) merupakan pengeluaran anggaran belanja untuk membiayai program dan kegiatan yang berhubungan dengan sektor pendidikan.

Alokasi anggaran belanja sasaran strategis 1 (satu) sebesar 9,40 % total anggaran belanja daerah, dengan realisasi belanja sebesar 83,21 %, sedangkan alokasi anggaran belanja strategis 2 (dua) sebesar 0,18 %, dengan realisasi belanja sebesar 91,48 % dan sasaran strategis 3 (tiga) hanya sebesar 0,02 %, dengan realisasi belanja sebesar 72,70 %. Jika dilihat persentase alokasi belanja untuk ketiga sasaran strategis tersebut masih kecil, berarti pengalokasian anggaran belanjanya untuk mendukung misi dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya perlu ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011, ketiga sasaran strategis capaian kinerjanya baik sekali, berarti harus dipertahankan capaian kinerjanya untuk tahun-tahun mendatang. Belanja asaran strategis empat, lima dan enam merupakan anggaran belanja yang diperuntukan membiayai program dan kegiatan yang berhubungan dengan sektor kesehatan. Alokasi anggaran belanja untuk sektor kesehatan bila di rata-ratakan hanya sebesar 1,05 % dari total belanja daerah, yang berarti masih rendah dan perlu ditingkatkan belanja yang dialokasikan untuk sektor kesehatan pada masa yang akan datang. Untuk misi 1

(satu) alokasi belanja yang terbesar yaitu untuk alokasi belanja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang terjangkau (9,40 %), sedangkan alokasi belanja yang paling kecil yaitu untuk alokasi belanja sasaran strategis meningkatkan tata kelola pendidikan yang akuntabel (0,02 %) dan sasaran strategis terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah transmigrasi.

2.2.5.2 Analisis dan Evaluasi Alokasi Anggaran Belanja Misi 2 (dua)

Misi 2 (dua) dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 5 (lima) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama. Belanja untuk sasaran strategis 12 (dua belas) dialokasikan untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang penyuluhan. Alokasi belanja yang diperuntukan bidang penyuluhan mendapatkan alokasi belanja sebesar 0,07 % dari total belanja daerah, dengan realisasi belanja sebesar 97,73 %. Berdasarkan LAKIP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 capaian kinerja untuk sasaran strategis 12 (dua belas) sebesar 93,39 %. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan untuk menjadikan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, mengingat sebagian besar geografis Kabupaten Kubu Raya dikelilingi oleh laut dan sungai, sehingga keempat potensi tersebut dijadikan primadona Kabupaten Kubu Raya.

Belanja untuk sasaran strategis 13 (tiga belas) dialokasikan untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang perdagangan, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu pembinaan terhadap usaha perdagangan, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, jumlah pasar dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan fokus meningkatkan tarap hidup masyarakat akibat dari roda perdagangan berdampak kepada penghasilan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pola hidup dan sebagainya.

Realisasi belanja untuk bidang perdagangan sebesar 84,72 % dan alokasi belanja sebesar 0,18 % dari total belanja daerah. Berdasarkan LAKIP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 capaian kinerja untuk sasaran strategis 13 (tiga belas) sebesar 118,96 %. Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan perdagangan daerah melalui penanaman modal dari berbagai investasi, baik dari dalam daerah, luar daerah maupun modal asing.

Belanja sasaran strategis 14 (empat belas) dialokasikan untuk program dan kegiatan UMKM, industri kecil dan menengah serta koperasi, bertujuan untuk meningkatkan berusaha dan pendapatan masyarakat dalam berbagai usaha di dalam menopang kehidupan keluarga, khususnya masyarakat kecil dan menengah, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu persentase koperasi aktif dan persentase pembinaan usaha mikro dan kecil. Alokasi belanja yang diperuntukan bidang industri dan koperasi sebesar 0,48 % dan realisasi belanja sebesar 97,72 % dari total belanja daerah. Berdasarkan LAKIP Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 capaian kinerja sasaran strategis 14 (empat belas) sebesar 179,82 % .

4.1.5.3 Analisis dan Evaluasi Alokasi Anggaran Belanja Misi 3 (tiga)

Misi 3 (tiga) dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama. Alokasi belanja sasaran strategis 17 (tujuh belas) sebesar 3,91 % dengan realisasi belanja

sebesar 98,28 %. Berdasarkan LAKIP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 capaian kinerja sasaran strategis 17 (tujuh belas) 110,6 %, hal ini didukung komitmen pimpinan daerah dalam menjaga dan menyediakan lahan-lahan produktif untuk penanaman tanaman pangan, terdapat budidaya tambak, kolam dan keramba dalam jumlah yang berarti. Sasaran strategis 18 (delapan belas) alokasi belanja sebesar 0,16 %, realisasi belanja sebesar 99,61 % dengan capaian kinerja 67 %, didukung program pengembangan agribisnis berbasis karet rakyat, membangun system usaha pembenihan, meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan ekonomi pedesaan. Sasaran strategis 19 (Sembilan belas) alokasi belanja sebesar 0,18 %, realisasi belanja sebesar 77,54 dengan capaian kinerja 178,6 %, didukung program rehabilitasi hutan dan lahan dengan melakukan monitoring pada kawasan rentan kebakaran. Sasaran strategis 20 (dua puluh) alokasi belanja sebesar 0,01 %, realisasi belanja sebesar 87,50 % dengan capaian kinerja 70,65 %. Sasaran strategis 21 (dua puluh satu) alokasi belanja sebesar 0,04 %, realisasi belanja sebesar 97,80 % dengan capaian kinerja 77,05 %. Sasaran strategis 22 (dua puluh dua) alokasi belanja sebesar 0,46 %, realisasi belanja sebesar 96,79 % dengan capaian kinerja 83,46 %, bertujuan setiap proses pembangunan agar selalu memperhatikan lingkungan hidup, untuk itu lingkungan yang berupa tanah, air, udara, hutan harus dikelola dengan baik agar terjaga ekosistem yang ada dan berkembang.

2.2.5.4 Analisis dan Evaluasi Alokasi Anggaran Belanja Misi 4 (empat)

Misi 4 (empat) dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama.

Sasaran strategis 23 (dua puluh tiga) yaitu meningkatnya profesionalisme aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu mendapatkan alokasi belanja dengan prosentase sebesar 0,64 %, realisasi belanja sebesar 96,65 % dari total belanja daerah, dengan capaian kinerja 95,23 %.

Sasaran strategis 24 (dua puluh empat), yaitu meningkatnya pelayanan prima aparatur untuk mendorong terciptanya pelayanan, bertujuan untuk mempermudah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerbitkan dasar hukum kebijakan, aturan yang jelas, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama. Alokasi belanja untuk sasaran strategis ini sebesar 2,13%, realisasi belanja sebesar 81,48 % dari total belanja daerah, dengan capaian kinerja 62,51 %.

Sasaran strategis 25 (dua puluh lima), yaitu terselenggaranya penelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan dukungan optimalisasi penerimaan daerah, bertujuan untuk efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama. Alokasi belanja untuk sasaran strategis ini sebesar 6,47 %, realisasi belanja 89,50 % dari total belanja daerah, dengan capaian kinerja 75,68 %.

Sasaran strategis 26 (dua puluh enam), yaitu meningkatnya kinerja aparatur, pengawasan yang berdaya guna untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam melaksanakan tugas dalam manajemen penyelenggaraan proses pemerintahan dan

pembangunan, yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ evaluasi, terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama. Alokasi belanja untuk sasaran strategis ini sebesar 6,60 %, realisasi belanja 99,84 % dari total belanja daerah, dengan capaian kinerja 77,05 %. Sasaran strategis 27 (dua puluh tujuh), terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Alokasi belanja untuk sasaran strategis ini sebesar 0,82 %, realisasi belanja 91,91 % dari total belanja daerah, dengan capaian kinerja 67,85 %. Sasaran strategis ini bertujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran strategis 28 (dua puluh delapan), yaitu meningkatnya pelayanan kehumasan untuk kepentingan publik bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat, terhadap perkembangan pembangunan, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama. Alokasi belanja untuk sasaran strategis ini sebesar 0,56 %, realisasi belanja sebesar 97,06 % dari total belanja daerah, dengan capaian kinerja 82,01 %. Sasaran strategis 29 (dua puluh Sembilan), terdiri dari dua indikator kinerja utama, bertujuan terciptanya hubungan yang harmonis antara pemeluk agama agar terjalin hubungan yang saling menghargai. Alokasi belanja untuk sasaran strategis ini sebesar 0,13 %, realisasi belanja 89,04 % dari total belanja daerah, dengan capaian kinerja 100 %.

III Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rasio rata-rata belanja tidak langsung sebesar 52,89 % sedangkan rasio rata-rata belanja langsung sebesar 47,11 %. Ini menunjukkan bahwa dari total belanja lebih besar dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Rasio belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung, rasio rata-rata belanja pegawai memberikan kontribusi yang sangat besar yaitu 82,45 % terhadap belanja tidak langsung dan sisanya dialokasikan pada belanja hibah sebesar 6,04 %, belanja bantuan sosial sebesar 4,27 %, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 6,30 %. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lebih mengutamakan kontribusi anggaran belanja tidak langsung untuk kepentingan belanja pegawai. Rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2008-2011 sebesar 32,99 %, hal ini berarti belanja modal penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana yang manfaatnya melebihi satu tahun yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat masih relatif kecil.
2. Persentase pertumbuhan belanja tidak langsung pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang negatif (- 19,20), yang disebabkan karena adanya pengurangan anggaran belanja tidak langsung, sedangkan persentase pertumbuhan belanja langsung meningkat menjadi 101,34 %. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap memberikan prioritas untuk pengadaan dan perbaikan infrastruktur serta untuk kepentingan masyarakat banyak.

3. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2009 dan tahun 2010 dianggap tidak baik dalam pengalokasian anggarannya, karena belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung, sehingga tidak optimal. Untuk tahun 2008 dan tahun 2011 pengalokasian belanja lebih baik, disebabkan belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sehingga dikatakan optimal. Rasio keserasian belanja rata-rata belanja tidak langsung sebesar 52,89 %, sedangkan rata-rata belanja langsung sebesar 47,11 %, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum mampu mengoptimalkan dananya untuk biaya pelayanan publik.
4. Untuk rasio efisiensi belanja, pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi yaitu pada tahun 2008-2011 rasio efisiensi berada dibawah 100 %. Ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan baik, dimana rata-rata rasio efisiensi periode tahun 2008-2011 memberikan kontribusi sebesar 93,02 %.
5. Pengalokasi anggaran belanja pemerintah sudah sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya dan capaian kinerja Sasaran Strategis pada umumnya baik sampai baik sekali.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Merencanakan anggaran belanja lebih diutamakan untuk belanja langsung, dengan menitik beratkan pada pos-pos anggaran belanja yang langsung untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, kependudukan dan lainnya yang bersifat strategis. Meningkatkan rasio belanja hibah, rasio belanja bantuan sosial, rasio belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan rasio belanja modal untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Dalam pengalokasian belanja daerah, diharapkan konsisten dan selalu meningkatkan anggaran belanja, terutama anggaran belanja langsung.
3. Dalam merealisasi belanja untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat melakukan optimalisasi belanja.
4. Untuk tahun-tahun yang akan datang diharapkan tetap dapat melakukan efisiensi belanja, sehingga kinerja pemerintah daerah baik.
5. Dalam mengalokasikan anggaran belanja hendaknya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya yang sudah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran dan tujuan strategis dapat dicapai.

